

Penanganan korupsi secara hukum adalah salah satu permasalahan yang sering kita saksikan. Hal ini karena korupsi memang merupakan kejahatan luar biasa yang harus diusut dan ditindak secara hukum. Namun demikian, ternyata perilaku korupsi tersebut bukannya berkurang, tapi malahan merajalela. Bahkan dapat kita saksikan bahwa KPK telah dipolitisasi, dikriminalisasi, dan didemo. Hal ini menunjukkan belum nampaknya hasil yang sistematis untuk memberantas korupsi di negeri ini. Oleh sebab itu, buku ini menawarkan pendekatan lain untuk menyodorkan solusi atas permasalahan korupsi. Kedua penulisnya, Zainal Abidin dan A. Gimmy Prathama Siswadi, beranggapan bahwa korupsi "sakitnya tuh di sini..." (sambil menunjuk dahi). Atas hal inilah kedua penulis ini melakukan penelitian psikologi terhadap sejumlah pelaku korupsi, sekaligus membuat pemetaan koruptor. Hasilnya sangat menarik, karena muncul hal-hal yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Selamat membaca.

Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono

Psikolog

PSIKOLOGI KORUPSI

ZAINAL ABIDIN
A. GIMMY PRATHAMA SISWADI

Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi,
Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan
Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia

Pengantar

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA.

Rektor Universitas Padjadjaran 2010 - 2015



ZAINAL ABIDIN
A. GIMMY PRATHAMA SISWADI

PSIKOLOGI KORUPSI

Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi,
Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan
Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia



Penerbit **PT REMAJA ROSDAKARYA** Bandung

PSIKOLOGI KORUPSI

Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi,
Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan
Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia

RR.PS0003-01-2015

Penulis Zainal Abidin
A. Gimmy Prathama Siswadi
Editor Engkus Kuswandi
Proofreader Nur Asri
Desainer sampul Guyun Slamet
Layout Roni Sukma Wijaya

Diterbitkan oleh **PT REMAJA ROSDAKARYA**

Jln. Ibu Inggit Gamasih No. 40

Bandung 40252

Tlp. (022) 5200287

Fax. (022) 5202529

e-mail: rosdakarya@rosda.co.id

www.rosda.co.id

Anggota Ikapi

Cetakan pertama, Juli 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang pada Penulis

ISBN 798-979-692-645-9

Dicetak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset - Bandung



BUDAYA TIDAK JUJUR SEBAGAI MUARA PERILAKU KORUPSI

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA.
(Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2010-2015)

Di dalam buku ini disebutkan, bahwa korupsi paling tidak memiliki 5 (lima) komponen, yaitu: (1) korupsi adalah suatu perilaku, (2) perilaku tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang, (3) dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, (4) melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral, (5) terjadi atau dilakukan dalam *public office setting*.

Dari kelima komponen tadi, menarik kiranya apabila aspek perilaku mendapat perhatian utama, karena korupsi sesungguhnya hanya bagian hilirnya saja. Muaranya sendiri adalah perilaku tidak jujur (baca: Korupsi adalah sebagai pengejawantahan dari perilaku tidak jujur-pen). Karena apabila berperilaku jujur, walaupun punya kesempatan dan punya kedudukan (wewenang) di *public office*, mereka tidak akan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara-cara melanggar hukum atau menyimpang dari norma yang berlaku.

Ketika Montesquieu menggagas *Trias Politica*, asumsinya bahwa para penghuni dari ketiga lembaga tersebut, yaitu legislatif, eksekutif dan

yudikatif adalah berperilaku jujur. Sebab, apabila mereka tidak jujur, akan bagaimanakah jadinya suatu negeri? Menarik untuk disimak, bahwa salah satu kesimpulan dari buku ini adalah bahwa pola korupsi di Indonesia dilakukan tidak soliter, alias berjamaah di dalam satu institusi yang sama, lintas lembaga (sehingga asumsi dasar dari *Trias Politica* tidak berlaku-pen), ada perantara yang ditambah dengan keterlibatan pengusaha (korporasi).

Selanjutnya, karena kekuasaan bisa dijadikan ladang untuk memenuhi birahi hedonisme pribadi, pundi-pundi kelompok dan atau golongan, maka hubungan antarpengisi kelembagaan bisa saling kunci dengan kartu "truf" masing-masing, dalam bentuk koalisi gajah "Tahu Sama Tahu".

Di Indonesia, ketidakjujuran ini merebak di mana-mana dan ke mana-mana. Sebagai contoh, Ujian Nasional seringkali menjadi teater total ketidakjujuran, dengan aktor, mulai dari para pejabat, guru, percetakan, juga orang tua (walaupun pada tahun-tahun terakhir sudah kurang menyeruak). Demi anak, orang tua ikut sibuk mencari bocoran soal juga menyogok. Ada bocoran pasti ada yang membocorkan. Ada yang menyogok, pasti ada yang disogok. Tragisnya, untuk kasus di pendidikan, orang yang disogok tersebut adalah orang-orang yang terutama harus menegakkan kejujuran.

Hal yang sama terjadi pada penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi. Masih ada upaya-upaya untuk menitipkan anak agar diterima. Bayangkan, untuk pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dibentuk Panitia Nasional oleh para rektor. Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit, yakni sekitar Rp 175 miliar, dengan melibatkan panitia yang bekerja sepanjang tahun, membuat puluhan set soal dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, petugas percetakan dikonsinyir selama satu bulan, pengiriman soal dilakukan dengan pengawalan ketat aparat. Selanjutnya, pada saat ujian berlangsung, disewa ribuan ruang dengan melibatkan puluhan ribu pengawas. Biayanya, selain dari pemerintah yang notabene merupakan uang rakyat, juga dari kocek para peserta sendiri.

Seandainya dari serangkaian proses tersebut ujung-ujungnya bisa menyogok, atau bisa menitipkan, betapa semangat luhur untuk berkompetisi secara sehat dengan biaya mahal tersebut telah dicerai, egoistis, dan keluar dari akal sehat.

Sebagai kegiatan yang bersifat massal, biaya terbesar dari SBMPTN adalah untuk honor pengawas, yaitu mencapai Rp 60 miliar. Coba bayangkan, apabila pesertanya jujur, uang sebesar itu bisa digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif dan bermanfaat. Tapi realitas memang masih banyak yang tidak jujur. Hampir setiap tahun, perjokian

masih ada. Urusan contek-mencontek sekarang sudah semakin canggih, yakni dengan menggunakan teknologi mutakhir, seperti melalui jam tangan.

Perilaku mencontek sebagai bentuk ketidakjujuran, yang apabila sudah dimulai sejak di bangku sekolah, dapat berlanjut dalam bentuk yang lain di masa berikutnya, termasuk perilaku koruptif. Kata peribahasa "alah bisa karena biasa". Di Perguruan Tinggi sendiri masih sering terjadi kasus-kasus plagiat.

Kita pun tahu, bahwa untuk diterima di dalam suatu pekerjaan, banyak juga yang menyogok, dengan jumlah uang melebihi jumlah gaji yang akan diterima berbulan-bulan bahkan tahun. Seperti halnya kampanye, yang juga sering dilakukan dengan menyogok rakyat. Besaran uang sogokan, pada akhirnya harus ditutupi dengan ketidakjujuran baru, yaitu korupsi selama masa jabatan.

Konon, untuk urusan korupsi ini sudah ada hitungan matematisnya. Uang yang dikorupsi harus lebih besar daripada biaya kalau tertangkap, yaitu untuk membayar ketidakjujuran para penegak hukum yang akan mengambil keputusan, biaya hidup hotel prodeo dan biaya keluarga yang ditinggalkan selama masa ditahan. Hebatnya lagi, uang korupsi tersebut digunakan pula untuk naik haji dan berkali-kali umrah. Karena hitungan matematisnya uang, maka urusan malu tidak diperhitungkan lagi, termasuk oleh keluarganya, yang notabene sebagai penikmat. Beberapa kasus menunjukkan, bahwa korupsi bisa dilakukan secara bahu-membahu oleh satu keluarga. Suami dengan istri, ayah dengan anak, mertua dengan menantu, dan sebagainya. Urusan tidak punya malu lagi untuk korupsi dan dilakukan secara berjamaah di dalam satu keluarga, menarik pula kiranya untuk diteliti.

Sebagai sesuatu yang muncul ke permukaan, masalah ketidakjujuran ini bisa jadi sudah menjadi nilai-nilai hidup dari masyarakat banyak. Ingatlah kasus Saimi, seorang ibu yang melaporkan kebobrokan Ujian Negara pada tahun 2012, justru terusir dari wilayahnya, dimusuhi oleh sekolah, guru, tetangga, dan orang tua murid lainnya. Karena sudah merebak, banyak yang berkata: "Jangan melawan arus, nanti melelahkan". Kasus tersebut menunjukkan, bahwa melawan arus ternyata bukan hanya melelahkan, tapi juga bisa membahayakan. Ramalan Joyoboyo tentang zaman edan, mungkin sedang berjalan: "*Sopo sing ora edan ora keduman*".

Sikap hidup, perilaku, dan pembiaran oleh anggota masyarakat, menunjukkan bahwa jangnan-jangnan ketidakjujuran itu sudah jadi budaya. Bung Hatta dan Prof. Ismail Sunny, bahkan menyebutkan bahwa korupsi sudah menjadi budaya bangsa. Secara teoretis kita paham bahwa kebudayaan

diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui proses enkulturasi, atau bisa juga setiap generasi membuat budayanya sendiri.

Ketidakjujuran sebagai kebudayaan, bisa ditelusuri dari aspek kesejarahan, kecuali peristiwa-peristiwa insidental, seperti kebohongan Patih Gajah Mada dalam cerita Perang Bubat. Ketidakjujuran akut dan massif yang dilakukan oleh masyarakat tidak pernah terdengar dan tercatat dalam sejarah. Karenanya, ketidakjujuran sebagai kebudayaan, tentu merupakan produk dari generasi masa kini.

Teori Durkheim tentang perilaku masyarakat yang tidak tergantung kepada karakteristik individualnya, sebagai penunjuk perilaku sosiologis yang dikontrol oleh budaya "tradisi", tinggai cerita. Budaya adiluhung masa lalu dalam bentuk "*indigenous knowledge*" atau kearifan lokal ternyata tidak mampu mengarahkan syahwat individual ini. Ketidakberdayaan masyarakat dengan budayanya, menyebabkan budaya destruktif seperti ketidakjujuran ini, berada di atas angin—sehingga kalau dibiarkan, akan menghasilkan budaya baru seperti dikemukakan di atas.

Bukan hanya budaya adiluhung, agama pun sebagai inti dari nilai-nilai dalam berperilaku ternyata tidak berdaya. Sebagian mereka yang korupsi tersebut, selain bergelar akademis, juga bergelar haji. Kita tahu, bahwa ketika Nazarudin ditangkap, ternyata dia sedang berpuasa. Dia pasti takut kalau puasanya batal, karena Allah dan para Malaikat melihatnya. Orang pun kalau mau shalat, akan melakukan kontrol diri, karena Allah akan tahu bahwa ia masih punya wudhu, sudah batal atau tidak.

Bagi mereka yang beragama Islam, dari sudut pandang agama, ketidakjujuran akan terkait dengan pemaknaan rukun iman, terutama rukun iman tentang keberadaan Allah, malaikat, dan hari akhir. Dari sisi kenegaraan, tentu terkait dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Intinya, karena Tuhan ada dan selalu "membawa CCTV", maka perilaku harus sesuai dengan aturan Tuhan, atau paling tidak, harus sesuai dengan nilai-nilai universal.

Realitasnya, keberadaan Tuhan ini, selalu masih sebatas pada saat ibadah yang bersifat ritual, dalam bentuk batal atau tidak, takut dosa kalau tidak dilaksanakan, dan sebagainya. Tapi untuk hal lain, seperti harus jujur atau tidak korupsi, Tuhan dan malaikat sebagai pengawas, sepertinya dianggap tidak hadir. Buktinya, para koruptor tersebut banyak yang bergelar haji (dengan berhaji dan berumrah berkali-kali). Orang Indonesia akan sangat takut untuk disebut ateis. Mereka lupa, bahwa apabila Tuhan hanya dianggap hadir pada saat ibadah, sementara di saat lain dianggap tidak ada, maka kata yang tepat bagi kita dan juga bagi mereka adalah "ateisme kadang-kadang".

Kita tentu ingat tentang cerita hikmah dari seorang anak gembala, yang diajak kongkalikong oleh Umar bin Khatab, tentang gembalaan milik majikannya. Lalu anak itu menjawab: "Kalau begitu, Tuhan ada di mana?" Interpretasinya bisa macam-macam: "Itu kan anak gembala di zaman syahdan, sementara kita adalah manusia masa kini dengan strata sosial aduhai". Padahal yang lebih arif, kalau berpikir sebaliknya, yakni apabila anak gembala saja demikian, masa kita yang lebih bernalar tinggi justru berperilaku lebih rendah? Kalaulah kemudian agama tidak sanggup membangun perilaku *akhlakul karimah*, yang bisa dipertanyakan adalah metodologi pembudayaan oleh para dainya.

Menariknya, di negeri-negeri yang masyarakatnya jauh dari agama, justru kejujuran berdiri sangat tegak dan tingkat korupsi rendah. Salah satu kuncinya adalah melalui pembudayaan kehormatan diri dan penegakan hukum. Kalaulah Tuhan saja lewat, kehormatan diri juga tiada, maka hukum harus dimainkan.

Bagi para pejabat, setiap melaksanakan sumpah jabatan, maka akan dimulai dengan kata Demi Allah. Tapi di dalam praktik melaksanakan jabatannya tersebut, kata pertama dari sumpah tersebut seringkali tidak seperti tidak ada makna. Tadinya, kehormatan diri bisa menjadi harapan. Tapi sebagaimana dikemukakan di atas, ketika "huliah" dunia lebih deras, yang dengan ukuran matematika, korupsinya lebih menguntungkan, maka urat malu putuslah sudah. Termasuk urat malu dari mereka-mereka yang mempunyai pendidikan tinggi. Di dalam buku ini disebutkan ada 332 orang doktor, 147 orang bergelar Master, 119 orang lulusan S1, dan 10 orang Profesor.

Adakah harapan terhadap hukum? Masalah hukum yang *pertama* adalah karena hukum tersebut seringkali dibuat oleh orang-orang yang tidak jujur, atau dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tertentu dalam rangka melegalisasi ketidakjujuran. Masalah *kedua*, hukum yang di antaranya didasari oleh semangat ketidakjujuran tersebut dilaksanakan oleh penegak hukum yang juga tidak jujur. *Ketiga*, masih ada kasus-kasus hukum yang tebang-pilih atau tidak bisa menjangkau semua pihak.

Sejumlah koruptor kelas kakap, yang memakan uang negara, bisa lolos sampai masuk ke liang lahad, tanpa proses hukum, apalagi pengadilan. Dari kacamata keadilan manusia, tentu saja hal ini sangat tidak adil. Namun dari kacamata akhirat lain lagi. Tapi masihkah percaya dengan adanya hari akhirat?

Kalau ukurannya keadilan dunia, maka ceritanya lain lagi. Banyak cerita tentang tertangkapnya para koruptor, lalu orang menduga bahwa mereka sedang “apes” semata. Artinya yang tidak apesnya masih jauh lebih banyak lagi.

Kalau hukum tidak bisa ditegakkan, maka hukum hanya menjadi monumen semata. Cerita tentang marah-marahnya penumpang, karena kereta api selalu telat, yang untuk kemudian dengan sinisnya mohon agar jadwal perjalanan dibuang saja, dijawab santai oleh kepala stasiun: “Kalau tidak ada jadwal, dari mana kita akan tahu terlambat atau tidaknya?”

Betapa, ketika ketidakjujuran ini sudah mewabah, sampai-sampai kalau akan berkata jujur saja harus minta maaf terlebih dahulu. Siapa pun pasti tahu yang jujur itu seperti apa dan bagaimana? Namun mengapa hati dan kaki ini tetap saja melakukan ketidakjujuran? Dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahaya besar sedang mengancam. Thomas Lincona dari Cortland University (1992) menyebutkan bahwa ketidakjujuran adalah tanda-tanda kehancuran dari suatu bangsa.

Lalu “*lajuning laku*” apa yang harus dimainkan? Marilah kita mulai jujur terhadap diri sendiri, dengan cara melakukan revolusi nurani. Kalau tidak *edan-edan amat*, nurani pasti tidak akan bisa dibohongi.

Konten penting dari revolusi mental adalah revolusi untuk membudayakan kejujuran. Sehitam dan sebeku apapun hati terhadap kebenaran, pasti tahu benar dan salah. Inilah modal besar dari kefitrahan manusia. Kita gosok terus dengan nilai-nilai agama yang merupakan tugas para dai. Keberadaan Allah, malaikat, hari akhir, surga, dan neraka harus bisa dijadikan sebagai pengarah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, termasuk, konsekuensinya terhadap kehidupan kemanusiaan secara keseluruhan.

Budaya kejujuran juga harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan yang langsung diamalkan. Salah satu inti dari pendidikan karakter dan revolusi mental adalah pendidikan kejujuran. Untuk merumuskannya, kita bisa duduk bersama melakukan *workshop*. Diperlukan pula guru-guru yang memiliki integritas terhadap nilai-nilai kejujuran tersebut.

Kalaupun rumah sekarang sudah terintervensi tidak jujur, maka kita harus berupaya, bahwa basis “pendidikan” kejujuran harus dari rumah. Kita paham bahwa sosialisasi anak yang paling utama dalam internalisasi nilai-nilai berada di pundak ibu bapak di rumah. Modalnya, tidak akan ada orang tua yang ingin punya anak tidak jujur, dan lebih jauhnya lagi terperosok.

Budaya malu, apabila melakukan kebohongan atau perilaku menyimpang, bisa dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai kehormatan diri. Sebenarnya hal ini “pernah” menjadi budaya bangsa Indonesia, khususnya Sunda. Menghidupkan yang lama dengan cara-cara dan semangat kebaruan, hasilnya akan bisa lebih baik lagi.

Hukum dalam bentuknya, mulai dari “*folkways*”, “*customs*”, “*mores*,” sampai “*laws*” harus benar-benar bisa ditegakkan. Pembiaran akan membawa dampak terhadap eskalasi, dianggap tidak melanggar bahkan ujung-ujungnya dianggap sebagai sesuatu yang benar dan dalam bentuk akhirnya sebagai budaya.

Karena budaya ketidakjujuran baru muncul pada generasi kita, maka tanggung jawab kita semua untuk menyetopnya. Marilah kita mulai dari kita sendiri. Seandainya cendekiawan, seniman, budayawan, agamawan, pendidik termasuk lembaga pendidikan tidak mampu menegakkan akhlak kejujuran dan menyebarkanluaskannya, lalu siapa dan lembaga apa lagi yang masih diharapkan? Kita semua adalah benteng terakhir. Marilah kita jadikan semangat membudayakan kejujuran ini sebagai bola salju, menggelinding dan terus membesar.

Kita harus berterima kasih kepada Bung Zainal Abidin dan Bung A. Gimmy Prtahama Siswadi atas buku Psikologi Korupsi yang mereka tulis. Sebuah buku yang bernas, karena selain menyampaikan berbagai teori psikologi tentang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, juga ditunjang oleh fakta-fakta lapangan yang cukup kuat. Hasilnya memperlihatkan tentang bentuk-bentuk, jenis-jenis, dan pola-pola korupsi—yang kemudian dideskripsikan dengan sangat menarik. Dari apa yang mereka uraikan, kita seolah diajak melakukan wisata intelektual untuk menyaksikan suatu kenyataan yang terjadi di Indonesia.

Dengan mengetahui konsep, jenis, dan pola korupsi di Indonesia, maka (apabila mau—pen) dapat dicari solusi untuk memecahkannya, terutama pada tataran hulunya, yang disebut sebagai perilaku.

Sebagai penutup, berikut ini merupakan cerita tentang suatu negeri yang tingkat korupsinya sangat tinggi.

Syahdan, serombongan anggota legislatif dan eksekutif dari negeri entah di mana, sedang melakukan studi banding. Karena semua negara di dunia sudah sering dijelajahi, mereka melakukan studi bandingnya ke akhirat. Ketika berkeliling, mereka diajak melihat museum jam. Ada yang aneh di museum tersebut. Kecepatan berputar jarum jamnya berbeda satu sama lain. Ada yang sangat lambat dan ada pula yang sangat cepat.

Menurut Bapak Malaikat sang penjaga, hal tersebut menunjukkan tingkat korupsi di negara tersebut. Salah seorang anggota delegasi bertanya, "Mengapa jam dari negaranya tidak ada?" Sang Malaikat yang menjadi "guide" menjawab: "Oh..., kalau jam negara Anda, sedang dipinjam tukang sate untuk jadi alat kipas..."

Bandung, 18 Juni 2015



PENGANTAR

Tidak ada isu yang selalu aktual sejak awal Reformasi (1998) hingga saat ini di Indonesia, selain isu korupsi. Setiap hari media massa nyaris tidak pernah berhenti dan bosan memuat berita-berita tentang korupsi. Lobby Gedung (Kantor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah sepi dari kerumunan para reporter yang menunggu berita tentang korupsi untuk segera dimuat di media tempat mereka bekerja; berita yang ditunggu-tunggu oleh para reporter tersebut adalah tentang korupsi, khususnya penangkapan dan pemeriksaan para tersangka serta para saksi kasus-kasus korupsi. Penonton televisi, pendengar radio, dan pembaca koran dan majalah serta media massa *on line* (internet) selalu menunggu berita tentang pejabat, politisi, petinggi polisi, atau pengusaha mana lagi yang akan segera dijadikan sebagai tersangka dan diseret ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Gejala ini berlangsung sejak awal tahun 2000-an—setelah didirikan KPK, dan setelah komisi ini mulai menjalankan tugas dan perannya sebagai pemberantas korupsi—hingga sekarang ini.

Atas dasar gejala seperti itulah penulis terdorong untuk melakukan studi tentang korupsi dari perspektif ilmu yang selama ini digeluti oleh penulis, yakni psikologi. Sebagian dari hasil studi itu ditulis dalam buku ini. Buku ini berusaha mendeskripsikan tiga aspek yang—menurut penulis—hampir selalu ditemukan dalam setiap kasus korupsi, yakni aspek-aspek psikologis para pelaku korupsi, pola-pola korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi, dan penanganan kasus-kasus korupsi. Penanganan kasus-kasus korupsi dalam buku ini difokuskan pada penindakan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga aspek ini urgen dan menarik untuk diungkap, karena di Indonesia sebagian besar kasus korupsi berskala besar (*grand corruption* dan *political corruption*) hampir selalu melibatkan ketiga aspek (atau komponen) itu, yakni pelaku korupsi, (pola) perilaku korupsi, dan institusi yang memberantas atau menangani korupsi (terutama, KPK).

Buku ini dimaksudkan untuk konsumsi umum, terutama para akademisi (termasuk mahasiswa), dan para penegak hukum, serta para pegiat anti-korupsi. Studi-studi dan buku-buku tentang korupsi di Indonesia sejauh ini ditulis berdasarkan pada perspektif non-psikologi, seperti dari perspektif hukum, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, dan administrasi. Tetapi studi tentang korupsi dari perspektif psikologi, relatif tidak mudah ditemukan dalam literatur di Indonesia, terutama dalam bentuk buku seperti ini. Buku ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan itu.

Buku ini selesai disusun awal bulan Januari 2015, sebelum munculnya peristiwa yang sangat menghebohkan, yakni penetapan Irjen Budi Gunawan (BG) (kandidat Kapolri) sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 13 Januari 2015. 10 hari setelah penetapan BG sebagai tersangka, dua pimpinan KPK (Abraham Samad atau AS dan Bambang Widjojanto atau BW) kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Tidak hanya itu, dua pimpinan KPK lainnya, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen dilaporkan oleh sejumlah pihak ke Bareskrim Polri. Zulkarnaen dituduh menerima gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sedangkan Adnan Pandu Praja dituduh menguasai perusahaan secara illegal. Irjen BG saat ini sudah tidak lagi menjadi tersangka karena penetapan tersangkanya oleh KPK dinilai tidak sah oleh Hakim Sarpin di sidang praperadilan pada tanggal 16 Februari 2015. Tetapi penetapan tersangka kedua pimpinan KPK masih terus dilanjutkan dan diproses oleh Bareskrim Polri. Demikian juga, penyelidikan Bareskrim terhadap Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen hingga saat ini tidak dihentikan (<http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/05/-366931/kasus-zulkarnain-dan-adnan-pandu-kabareskrim-pending-bukan-berhenti>).

Hingga kini “konflik” antara pimpinan KPK dan para petinggi Polri itu belum selesai, dan entah kapan akan berakhir. Konflik itu sangat disayangkan karena telah merugikan upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, yang selama belasan tahun relatif berhasil mengungkap dan menangani kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara. Namun, dalam buku ini, penulis tidak akan masuk ke wilayah (kasus) itu, apalagi membahas “konflik” di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut. Dalam buku ini, deskripsi dan penjelasan tentang pola penanganan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, dibatasi hanya pada kasus-kasus sebelum penetapan BG sebagai tersangka.

Sangat disadari oleh penulis bahwa buku ini tidak akan mungkin ditulis tanpa bantuan sejumlah pihak yang membantu penulis, mulai dari pendanaan dan proses penelitian, sampai penulisan dalam bentuk buku. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, (Rektor UNPAD periode 2007-2015) yang telah memberi perhatian khusus kepada penulis untuk mengkaji kasus-kasus korupsi dan menantang peneliti menjawab secara ilmiah pertanyaan, “Kenapa manusia Indonesia cenderung melakukan korupsi?”
2. Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS., Ketua LPPM UNPAD, Soudy Kuswaryan, Ir., MS. selaku Sekretaris LPPM Unpad, beserta semua staf di LPPM UNPAD. Khususnya kepada Pak Gugum (Gumilar), terima kasih untuk dukungan dan bantuannya yang luar biasa.
3. Dr. Hj. Hendriati Agustiani, M.Si., Dekan Fakultas Psikologi UNPAD, yang selalu mendukung penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan buku.
4. Johan Budi SP., Direktur Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah bersedia memberi informasi untuk studi yang dilakukan oleh penulis.
5. Dr. Zainal Muttaqin, S.H., MH. dan Dr. Agus Mulya, S.H., MH. yang sudah meluangkan waktu untuk membaca *draft* buku dan memberi masukan terkait dengan istilah-istilah dan bahasa hukum.
6. Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., Ph.D., yang telah menyuplai artikel-artikel pada jurnal-jurnal terbaru saat penulis membutuhkannya.
7. Drs. Budi Hartono, M.Si., sebagai dosen Fakultas Psikologi UI, yang telah membaca dan mereviu *inventory* kepribadian yang dipakai dalam penelitian ini.
8. Dede, Ason, Pak Endang, terutama Pak Kanda, dan seluruh *civitas academica* Fakultas Psikologi UNPAD, yang selalu siap membantu

penulis dalam memecahkan kesulitan-kesulitan teknis dan prosedural penulisan.

9. Para partisipan yang telah bersedia menjadi responden untuk mengisi angket penelitian dan menjadi partisipan dalam interviu dan *focus group discussion*. Saya dapat memahami kondisi dan suasana batin sesudah divonis bersalah oleh pengadilan, sehingga kesediaan (dan juga penolakan) bapak-bapak untuk berperan serta dalam studi yang dilakukan oleh penulis, merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan penulis sangat apresiatif untuk hal itu.
10. Para informan dan sejumlah individu serta institusi-institusi yang tidak dapat disebutkan nama-namanya, karena alasan-alasan keamanan dan kenyamanan. Penulis harus menjaga kerahasiaan (*confidentiality*) Anda semua demi etika akademis yang dijunjung oleh penulis.
11. Pimpinan Penerbit Remaja Rosdakarya yang telah bersedia menerbitkan hasil studi ini dalam bentuk buku untuk konsumsi publik.

Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua selalu diberkati oleh Allah Swt.

Bandung, Juni 2015

ZA dan AGPS



DAFTAR ISI

BUDAYA TIDAK JUJUR SEBAGAI MUARA

PERILAKU KORUPSI — iii

PENGANTAR — xi

DAFTAR ISI — xv

BAB I PENDAHULUAN — 1

Masalah Korupsi di Indonesia — 1

Manfaat Studi Korupsi dalam Buku ini — 8

**BAB II KORUPSI: PENGERTIAN, SEBAB-SEBAB,
DAN DAMPAKNYA — 11**

Definisi Korupsi — 11

Jenis-Jenis Korupsi — 13

Korupsi Menurut UU Anti-Korupsi — 15

Sebab-Sebab Munculnya Korupsi — 17

Dampak Korupsi — 21

BAB III PSIKOLOGI KORUPSI	— 25
Pengertian Psikologi Korupsi	— 25
Aspek-Aspek Psikologis dan Korupsi	— 30
Kepribadian dan Korupsi	— 31
Motivasi dan Korupsi	— 38
<i>Locus of Control</i> dan Korupsi	— 42
Aspek-Aspek Psikologis Lain Penyebab Korupsi	— 43
BAB IV PENANGANAN KORUPSI DI INDONESIA: PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	— 49
BAB V KERANGKA METODOLOGIS	— 53
Metode dan Sumber Data	— 53
Teknik Analisis Data	— 57
BAB VI PROFIL PSIKOLOGIS PELAKU KORUPSI	— 59
Gambaran Psikologis Para Pelaku Korupsi	— 62
Profil Kepribadian	— 62
Profil Motif	— 64
Profil <i>Locus of Control</i>	— 65
BAB VII POLA PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA	— 69
Pengantar	— 69
Pola Korupsi Anggota Parlemen di DPR	— 70
Pola Korupsi Menteri dan Pejabat Kementerian	— 74
Pola Korupsi Gubernur	— 76
Pola Korupsi DPRD Tingkat I dan Tingkat II	— 78
Pola Korupsi Anggota/Petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI)	— 80

Pola Korupsi Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) —	81
Pola Korupsi Pegawai/Pejabat Beberapa BUMN, Bank Indonesia, Kantor Pajak —	83
Pola Korupsi Penegak Hukum: Jaksa, Hakim, dan para Pegawai yang Berhubungan dengan Penegakan Hukum —	85
Pola Korupsi Pengacara —	86
Pola Korupsi Pengusaha —	87
Pola Korupsi Bupati/Wali Kota —	89
Pembahasan Umum tentang Pola Perilaku Korupsi —	91

BAB VIII POLA PENANGANAN KORUPSI

OLEH KPK — 111

Pola Kerja KPK — 112

Tim Kerja dalam KPK — 116

Perkembangan Pola Kerja KPK — 117

Prestasi KPK dalam Menyelamatkan Keuangan Negara — 120

Evaluasi Kritis terhadap KPK — 123

BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN — 129

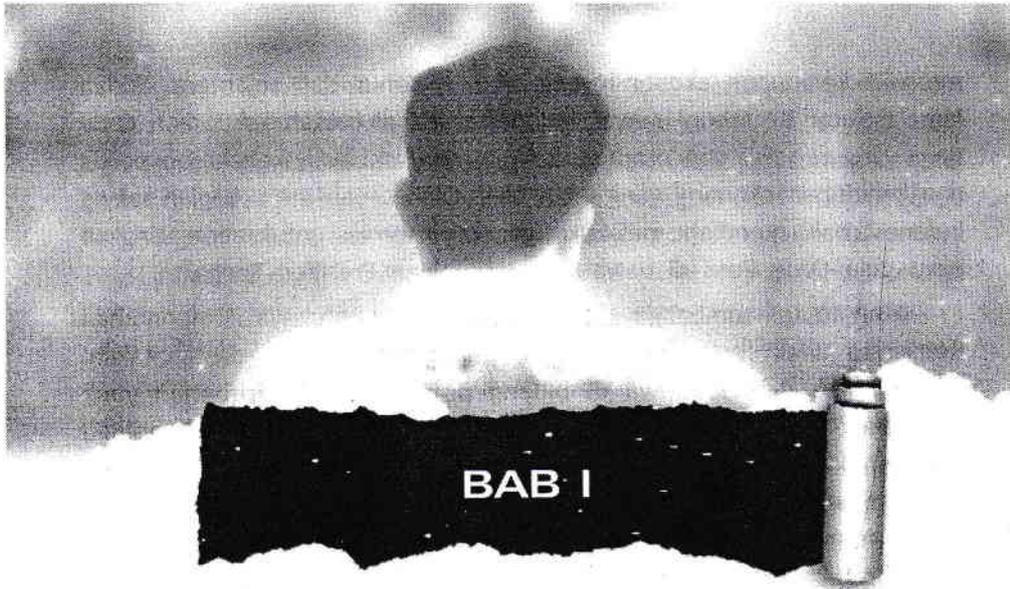
Kesimpulan — 129

Saran — 132

DAFTAR PUSTAKA — 135

LAMPIRAN — 141

TENTANG PENULIS — 223



PENDAHULUAN

Masalah Korupsi di Indonesia

Harapan segenap lapisan masyarakat Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 antara lain adalah terciptanya pemerintahan yang demokratis, bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Pemerintahan yang demikian diharapkan akan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Masyarakat berharap memiliki kebebasan berpolitik dan berserikat, bebas dari rasa takut, bebas dari kemiskinan, dan tentu saja



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2010, "Pelajaran Moral dari Kasus Urip-Artalyta," dalam *Jangan Bunuh KPK*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- _____. 2013. *Pola Perilaku Korupsi Para Koruptor Di Indonesia dan Pola Penanganan Kasus-Kasus Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian Psikologi Politik*. Laporan Penelitian. Hibah Fakultas Psikologi UNPAD.
- Abidin, Z. dan Prathama, A.G., 2014. "Faktor-faktor Psikologi Perilaku Korupsi dan Peran Psikologi dalam Pemberantasan Korupsi", dalam *Integritas*,

- Keberadaan dan Kesejahteraan Psikologi. Kontribusi Psikologi dalam Menjawab Tantangan Bangsa.* Jakarta: Himpunan Psikologi Indonesia.
- _____. 2014. *Pola perilaku korupsi di Indonesia dan penanggannya oleh KPK.* Kajian Psikologi Politik. 2014. Laporan penelitian, PUPT LPPM UNPAD.
- _____. 2009. *Studi psikososial tentang Korupsi di Indonesia.* (Laporan Penelitian). Hibah Kompetitif, DIKTI).
- Abidin, Z; Purwono, U; dan Prathama, A.G. 2011. *Studi Psikososial tentang Korupsi di lingkungan birokrasi di Indonesia.* (Laporan penelitian). LPPM UNPAD.
- Alderfer, C.P. 1972. *Existence, Relatedness, and Growth; Human Needs in Organizational Settings,* New York: Free Press.
- Alkostar, Artidjo. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern,* Yogyakarta: FH UII Press.
- Amundsen, Inge. 1997. *Political Corruption: An Introduction to the Issues.* Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights
- _____. 1999. *Political Corruption: Introduction to the Issues.* Bergen: Norway. Michelsen Institute.
- Aremu, A.O., Pakes, F. & Johnston, L. 2009. *The Effect of Locus of Control in the Reduction of Corruption in the Nigerian Police. An International Journal of Police Strategies & Management* Vol. 32 No. 1, 2009 pp. 144-156. www.emerald-insight.com/1363-951X.htm. Accessed: 19/08/2013 21:56.
- Nolen-Hoeksema, Susan. 2009 (15th edition). *Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology.* Cengage Learning.
- Baron, R.A., Brainscombe, N., Byrne, D. 2012 (14th edition). *Social Psychology.* New York: Allyn & Bacon.
- Boshoff, E. & Zyl, E.S. van. 2011. *The Relationship between Locus of Control and Ethical Behavior Among Employees in the Financial Sector.* In *Koers* 76(2), 2011: 283-303.
- Brytting, T., Minogue, R., Morino, P. t.th. *The Anatomy of Fraud and Corruption. Organizationa Causes and Remedies.* Gower.
- Carver, C. S. & Scheier. 2004 (fifth edition). *Perspectives on Personality.* Boston: Pearson.
- Cherry, John. 2006. *The Impact of Normative Influence and Locus of Control on Ethical Judgments and Intentions: A Cross-Cultural Comparison.* *Journal of Business Ethics,* Vol. 68, No. 2 (Oct., 2006), pp. 113-132 Published by: Springer Stabel URL: <http://www.jstor.org/stabel/25123901>. Accessed: 22/08/2013 11:30.

- Conelly, B. S. & Ones, D. S. 2008. "The personality of corruption. A national-level analysis." In *Cross-cultural Research*. Vol 42, Number 4, p. 353-385.
- Cottam, M.L., Dietz-Uhler, B., Mators, M. Preston, T. 2010. *Introduction to Political Psychology*: 2nd Edition. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Forsyth, Danelson R. 2010. *Group Dynamics* (5th edition). Belmont, CA: Wadsworth/Cengage.
- Hodgkinson, G.P. 1999. *Development and Validation of the Strategic Locus of control Scale*. Source: *Strategic Management Journal*, Vol. 13, No. 4 (May, 1992), pp. 311-317 Published by: WileyStabel URL: <http://www.jstor.org/stabel/2486617>. Accessed: 19/08/2013 21:13.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2011. *Evaluasi Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012 – 2015*. www.antikorupsi.org. diunduh 29 Desember 2012.
- Klitgaard, R. 1998. *Membasmi Korupsi* (terjemahan dari: Controlling Corruption). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KPK. 2008. Laporan Tahunan 2008.
- _____. 2009. Laporan Tahunan 2009.
- _____. 2010. Laporan Tahunan 2010.
- _____. 2011. Laporan Tahunan 2011.
- _____. 2012. Laporan Tahunan 2012.
- _____. 2012. Siaran Pers Akhir Tahun KPK, 2012/12/27.
- _____. 2014. *5 Perspektif Antikorupsi KPK bagi DPR*.
- Khan, M.H. 2006. Determinants of Corruption in Developing Countries: The Limits of Conventional Economic Analysis. In Rose-Ackerman. (ed.). 2006. *International Handbook on the Economics of Corruption*. Cheltenham, U.K.: Edward Elgard.
- Lambsdorff, J. G. 2006. "Causes and Consequences of Corruption: What do we know from a cross-section of countries," in Rose-Ackerman, S. (ed.), 2006. *International Handbook on the Economics of Corruption*. Cheltenham, U.K.: Edward Elgard.
- Levenson, H. 1973. *Reliability and Validity of the P,I, and C scales. A Multidimensional View of Locus of Control*. Paper Presented at American Psychological Association Convention (Montreal, Canada, August, 1973).
- McClelland, D. C. 1985. How Motives, Skills, and Values Determines what People Do. *American Psychologist*, 40, 812-825.
- McCrae, R.R. & Costa, P.T. 2006. *Personality in Adult. A Five-factor Theory Perspective*. Second edition. New York: The Guilford Press.

- Miner, J.B. 2005. *Organizational Behavior 1. Essential Theories of Motivation and Leadership*. New York: M.E. Sharpe.
- Mittelman, W. 1991. Maslow's Study of Self-actualization: A Reinterpretation. *Journal of Humanistic Psychology*, 31(1), 114-135. doi: 10.1177/00221678913111010.
- Monroe, Kristen Renwick; Chiu, William; Adam Martin, and Portman, Bridgette. 2009. "What Is Political Psychology?" In *Perspectives on Politics*, December 2009, Vol. 7/No. 4, p. 859-882.
- Myint, U. 2000. Corruption: Causes, Consequences, and Cures. *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 7, No. 2, December 2000.
- OECD, 2008, OECD Glossaries. *Corruption A Glossary of International Standards In Criminal*. <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/-41194428.pdf>.
- Pervin, L. A., Cervone, D., & John, O. P. 2005. *Personality. Theory and Research*. Hoboken (USA): John Wiley & Sons, Inc.
- Philp, Mark. 1997. "Defining political corruption". *Political Studies*. XLP (436-462).
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi. Elemen Sistem Integritas Nasional* (terj. dari *Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System, Jeremy Pope and Transparency International, 2002*).
- Raja, Usman. 2004. *The Relationship of the Big Five Personality Dimensions to Personal and Organizational Outcomes: Answering the Question Who and When?* Dissertation in Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.
- Rose-Ackerman, S. (ed.). 2006. *International Handbook on the Economics of Corruption*. Cheltenham, U.K.: Edward.
- Schmidt, L.C. & Frieze, I.H. 1997. "A Mediational Model of Power, Affiliation, and Achievement Motive and Product Involvement." In *Journal of Business and Psychology*. Vol 11, No 4 (Jun, 1997), p. 425-446. <http://www.jstor.org/stabel-/25092564>. Accessed: 19/08/2013.
- Sears, D. O; Huddy, L; Jervis. R. 2003. *Oxford Handbook of Political Psychology*. Oxford University Pers.
- Tavits, M. 2005. *Causes of Corruption: Testing Competing Hypotheses*. <http://www.nuffield.ox.ac.uk/politics/papers/2005/Tavits%20Nuffield%20WP.pdf>. Accessed: 06/03/2012.
- Transparency International. <http://www.transparency.de/mission.html> (Dec. 15th, 1998).
- UU 31 tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001.
- Wu, Wann-Yin & Huang, Chu-Hsin. 2013. "Motives and Likelihood of Bribery: An Experimental Study of Managers in Taiwan". In *Ethics & Behavior*, 23(4), 278-298.

Zyglidopoulos, S. C., Fleming, P. J., Rothernberg, S. 2008., Ratinization, overcompensation, and the escalation of corruption in organization. In *Journal of business ethics*. Springer 2008

Sumber dari media massa online

www.kompas.com

www.tempo.co

www.mediaindonesia.com

www.detik.com

www.republika.co.id

www.sinar-harapan.co.id

Sumber dari website

KPK (www.kpk.go.id)

ICW (Indonesia Corruption Watch) (www.antikorupsi.org)

TII (Transparency International Indonesia) (www.ti.or.id)

Sumber dari media cetak

Kompas

Tempo

Media Indonesia

Sumber dari internet yang dirujuk langsung di setiap bab

<http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996/Akibat-Korupsi-Uang-Negara-Menguap-Rp168.19-triliun>

<http://pukat.hukum.ugm.ac.id/index.php?action=archive.list&id=39>

<http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/41194428.pdf>

<http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=2>

<http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tugas-dan-wewenang>

<http://www.tempo.co/read/news-/2010/06/29/-063259301/Inilah-Polisi-yang-Disebut-Memiliki-Rekening-Gendut>

<http://www.sinar-harapan.co.id/>

<http://news.detik.com/read/2013/11/15/111748/2413955/10/tak-merasa-bersalah-senyum-koruptor-bikin-muak>

<http://acch.kpk.go.id/statistik>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-i-whistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/08/01/063420585/Pelapor-Korupsi-Simulator-SIM-Siap-Buka-bukaan>

http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6361&Itemid=114



TENTANG PENULIS



Zainal Abidin. Beliau telah menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Filsafat dan S2 di Fakultas Psikologi UGM. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan S3 di Fakultas Psikologi UI, dan lulus dengan predikat *cum laude*.

Sejak tahun 1991 sampai saat ini, beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Psikologi UNPAD Bandung.

Beliau juga merupakan dosen tidak tetap pada Program Pascasarjana Fakultas Psikologi UI, dan dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Selain itu, beliau merupakan wakil ketua Ikatan Psikologi Sosial (IPS) Indonesia untuk Periode 2015-2019.

Beberapa buku filsafat dan psikologi yang telah ditulis beliau dan menjadi buku pegangan (*text book*) beberapa perkuliahan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya adalah: *Filsafat Manusia; Pengantar Filsafat Barat; Analisis Eksistensial untuk Psikologi dan Psikiatri; Penghakiman Massa*; dan lain-lain. Selain *text book*, beberapa tulisan dalam bentuk bunga rampai di beberapa buku yang telah terbit, antara lain: *Jangan Bunuh KPK* (2009), *Isu-Isu Mutakhir Penelitian Psikologi Sosial* (Ikatan Psikologi Sosial, 2012). *Integritas, Keberbedaan & Kesejahteraan Psikologis* (Himpunan Psikologi Indonesia, 2014). Selain itu, beberapa artikel yang beliau tulis juga pernah dimuat di beberapa media massa, antara lain Kompas, Gatra, dan lain-lain. Adapun tulisan-tulisan beliau dalam bentuk artikel ilmiah, sebagian telah diterbitkan di sejumlah jurnal nasional dan sedang akan diterbitkan di jurnal internasional.

Di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen dan penulis, beliau juga sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar ilmiah. Bahkan sejak tahun 2012, beliau sering diminta menjadi narasumber di beberapa televisi nasional, seperti di TV One, Metro TV, Kompas TV, dan lain-lain, untuk dimintai pendapatnya mengenai kekerasan, politik, dan korupsi di Indonesia. Kepakarannya dalam tiga bidang itu (kekerasan, politik, dan korupsi) diawali dan ditunjang oleh sejumlah penelitian yang dilakukan olehnya sejak awal tahun 2000-an dalam bidang perilaku agresif (kekerasan), perilaku politik, dan perilaku korupsi dari perspektif psikologi. Beliau dapat dihubungi melalui email: znlabidin22@gmail.com

PSIKOLOGI KORUPSI

Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi,
Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan
Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan salah satu isu yang selalu aktual sejak era Reformasi (1998) bergulir hingga saat ini. Media massa baik cetak, elektronik, maupun online (internet) nyaris tidak pernah berhenti dan bosan memuat berita-berita tentang korupsi; demikian pula studi-studi dan buku-buku tentang korupsi telah banyak ditulis oleh para ahli. Namun demikian, studi-studi dan buku-buku tentang korupsi di Indonesia sejauh ini lebih banyak ditulis berdasarkan pada perspektif non-psikologi, seperti dari perspektif hukum, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, dan administrasi. Sementara, studi tentang korupsi dari perspektif psikologi relatif tidak mudah ditemukan dalam literatur di Indonesia, terutama dalam bentuk buku seperti ini.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan studi tentang korupsi yang diuraikan berdasarkan perspektif Psikologi, sebagai upaya mengisi kekosongan terhadap literatur-literatur yang telah ditulis berdasarkan perspektif yang beragam. Dalam buku ini, penulis berusaha mendeskripsikan tiga aspek yang hampir selalu ditemukan dalam setiap kasus korupsi, yakni aspek-aspek psikologis para pelaku korupsi, pola-pola korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi, dan penanganan kasus-kasus korupsi. Ketiga aspek tersebut merupakan permasalahan yang menarik untuk diungkap, karena sebagian besar kasus korupsi berskala besar (*grand corruption* dan *political corruption*) di Indonesia hampir selalu melibatkan ketiga aspek tersebut.



 ptremajarosdakarya  @rosdakarya - @e_rosda

ISBN 978-979-692-645-9

